

# Statistik Pendidikan Kabupaten Pinrang 2020





Statistik Pendidikan  
Kabupaten Pinrang

2020

# STATISTIK PENDIDIKAN

## KABUPATEN PINRANG 2020

**Nomor Publikasi** : 73150.2125  
**Katalog** : 4301002.7315  
**Ukuran Buku** : 14,8 x 21 cm  
**Jumlah Halaman** : viii + 48 halaman  
**Naskah** : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

### Tim Penyusun Naskah

**Penanggung Jawab** : H. Muhammad Asri Lantong, S.E.  
**Koordinator** : Ugiana Ramdhani, SST, M.S.E.  
**Anggota** : Ekwinda Linggar Surya Kusuma, S.Si.

**Penyunting** : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang  
**Gambar Kover** : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang  
**Penerbit** : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang  
**Pencetak** : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang  
**Sumber Ilustrasi** : [www.canva.com](http://www.canva.com)

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

## KATA PENGANTAR

Pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa di masa mendatang, sudah selayaknya direncanakan sebaik-baiknya untuk hasil yang berkualitas. Peserta didik diharapkan mampu bertahan dengan baik serta mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Pendidikan bermutu sebagai hasil upaya tersebut akan menjadi modal menuju Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Bidang pendidikan menjadi tujuan ke-4 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Selain itu, bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Publikasi dengan judul “Statistik Pendidikan Kabupaten Pinrang 2020” ini merupakan publikasi yang disusun oleh Badan

Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2020, untuk memberikan gambaran mengenai kondisi Pendidikan di Pinrang secara umum.

Publikasi ini menyajikan informasi dasar mengenai angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), angka buta huruf, penduduk yang tidak bersekolah lagi, dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Penyajian publikasi ini di susun secara deskriptif dalam bentuk narasi, ulasan singkat, dan grafik yang berbasis gender, serta dilampirkan tabel-tabel pendukung untuk menunjang informasi.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi yang akan datang. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Pinrang, Desember 2020  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PINRANG



H. Muhammad Asri Lantong, S.E.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan.....	6
1.3. Sumber Data.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II .....	9
METODOLOGI .....	9
2.1. Ruang Lingkup.....	9
2.2. Kerangka Sampel .....	10
2.3. Rancangan Sampel .....	10
2.4. Metode Pengumpulan Data.....	11
2.5. Pengolahan Data.....	12

BAB III .....	13
KONSEP DAN DEFINISI .....	13
BAB IV .....	17
PEMBAHASAN .....	17
4.1. Angka Partisipasi Sekolah .....	18
4.1.1. Partisipasi Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .....	19
4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun .....	21
4.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, dan SMA .....	23
4.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA .....	25
4.2. Angka Buta Huruf .....	28
4.3. Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi.....	33
4.4. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ...	35
4.5. Fasilitas Pendidikan dan Jumlah Siswa .....	36
4.6. Rasio Murid/Siswa terhadap Sekolah dan Guru....	38
PENUTUP .....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	46
LAMPIRAN .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persentase Penduduk Usia 0-6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Kelamin, 2019-2020 .....	21
Tabel 2.	Angka Buta Huruf (ABH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2020 .....	32
Tabel 3.	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2020 .....	35
Tabel 4.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pinrang, 2020 .....	37



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2020 ..... 22
- Gambar 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP dan SMA Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2020 ..... 25
- Gambar 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2020..... 27
- Gambar 4. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2020 ..... 31
- Gambar 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2020..... 36
- Gambar 6. Rasio Murid Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SLB di Kabupaten Pinrang, 2020 ..... 38
- Gambar 7. Rasio Murid Terhadap Guru Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang, 2020 ..... 39
- Gambar 8. Rasio Guru Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang, 2020 ..... 41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas SDM perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan daya saing yang tinggi sehingga Indonesia bisa tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi negara berpenghasilan menengah tinggi. Tidak dipungkiri, pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai salah satu aspek yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia, pendidikan berperan secara signifikan dalam membekali manusia untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang nantinya akan berpengaruh secara positif terhadap lingkungan di sekitarnya.

Pembangunan di bidang pendidikan telah disepakati oleh para pemimpin dunia yang dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tepatnya pada Tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Ke depannya, fokus pembangunan pendidikan merupakan lanjutan pembangunan pendidikan sebelumnya, yakni mengutamakan peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas (RPJMN 2020-2024). Tingkat pendidikan masyarakat telah membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Kesenjangan pendidikan juga masih tinggi apabila dibandingkan antar wilayah. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Akan tetapi, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Hasil PISA (*Program for International Student Assessment*) tahun 2018 menunjukkan bahwa proporsi siswa di Indonesia yang berada di atas standar kompetensi masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, dalam Ayat 2 ditekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang sehingga memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya (*civilized*). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapan dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Melihat pentingnya pembangunan di bidang pendidikan, sejak awal kemerdekaannya Indonesia telah mencanangkan kebulatan tekad bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah suatu keharusan dan mesti diutamakan. Ikrar tersebut terpatri dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu kalimat **“MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA”**.

Pada umumnya, pendidikan dilakukan secara berjenjang dimulai dari jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar (meliputi SD dan SMP atau sederajat), pendidikan menengah

(meliputi SMA dan SMK, atau sederajat), dan pendidikan tinggi (strata dan non strata).

Guna menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan, dibutuhkan informasi yang secara lengkap dapat menjelaskan kondisi dan situasi pembangunan pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Pinrang. Informasi tersebut digambarkan melalui berbagai macam indikator yang berkaitan dengan capaian pembangunan di bidang pendidikan dan disajikan dalam bentuk buku publikasi “**Statistik Pendidikan Kabupaten Pinrang 2020**”.

Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai dunia pendidikan yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020. Selain itu digunakan juga data sekunder dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang tahun ajaran 2020/2021 dan dari Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.

Gambaran keadaan pendidikan di Kabupaten Pinrang akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting, yakni kemampuan baca tulis penduduk (Angka Melek Huruf), Tingkat Partisipasi Sekolah yang meliputi Angka Partisipasi

Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan dan Partisipasi Sekolah Anak Usia Pra Sekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan, misalnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## 1.2. Tujuan

Publikasi ini disusun untuk menyediakan data tentang keadaan kesejahteraan penduduk dilihat dari sektor pendidikan yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan atau status pendidikan yang sedang diikuti. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini, antara lain:

1. Menyediakan data statistik berupa gambaran pendidikan penduduk Kabupaten Pinrang.
2. Menyediakan data dasar pendidikan Kabupaten Pinrang untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil berbagai kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan.

3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam melakukan evaluasi pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

### **1.3. Sumber Data**

Indikator pendidikan bersumber dari data hasil Susenas Kor Maret 2020. Susenas merupakan survei semesteran yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan cakupan yang relatif luas. Pelaksanaan Susenas dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Pinrang, sampelnya tersebar di 12 kecamatan yang mencakup seluruh wilayah baik perkotaan maupun perdesaan. Selain itu, digunakan juga data sekunder dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dan Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, data semester ganjil tahun ajaran 2020/2021.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Pembahasan utama publikasi ini dirinci ke dalam lima bab, dilengkapi dengan tabel dan grafik dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**, berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, dan sistematika penyajian.



- BAB II. **METODOLOGI**, menyajikan metodologi penyusunan publikasi berisi ruang lingkup, kerangka sampel, rancangan sampel, metode pengumpulan data, dan pengolahan data.
- BAB III. **KONSEP DAN DEFINISI**, menyajikan konsep dan definisi berisi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam penyusunan publikasi.
- BAB IV. **PEMBAHASAN**, menyajikan pembahasan berisi angka partisipasi sekolah, angka buta huruf, angka putus sekolah, penduduk tidak sekolah, dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
- BAB V. **PENUTUP**, menyajikan kesimpulan dari pembahasan.

## BAB II

# METODOLOGI

Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Bulan Maret tahun 2020. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan.

### 2.1. Ruang Lingkup

Susenas Maret 2020 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar dalam daerah perkotaan maupun perdesaan. Untuk Kabupaten Pinrang, jumlah sampelnya sebanyak 660 rumah tangga, tersebar dalam 66 blok sensus<sup>1</sup> di wilayah perkotaan dan perdesaan. Seluruh rumah tangga sampel dicacah menggunakan kuesioner VSEN20.K dan VSEN20.KP. Data yang dikumpulkan dalam Susenas meliputi keterangan umum anggota rumah tangga, kesehatan,

---

<sup>1</sup> Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Syarat blok sensus adalah harus memiliki batas-batas yang mudah dikenali, terletak dalam satu hamparan, serta setiap desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.

pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

## **2.2. Kerangka Sampel**

Kerangka sampel yang digunakan untuk pemilihan blok sensus terdiri dari 2 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga dalam blok sensus terpilih. Kerangka sampel blok sensus daerah perkotaan/perdesaan adalah daftar blok sensus yang terdapat di daerah perkotaan/perdesaan di setiap kabupaten/kota dari hasil sensus penduduk 2010 (SP2010). Sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumah tangga hasil update daftar hasil SP2010 dengan menggunakan Daftar VSEN20.P.

## **2.3. Rancangan Sampel**

Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 dilaksanakan setiap semester. Data yang dikumpulkan pada semester satu akan digunakan untuk memperkirakan (estimasi) sampai tingkat kabupaten/kota. Metode pengambilan sampel dilakukan dua tahap. Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus

secara *Probability Proportional to Size (PPS)<sup>2</sup> - Linear Systematic Sampling<sup>3</sup>* dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil listing di setiap blok sensus hasil Sensus Penduduk 2010. Tahap kedua, memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT dan keberadaan ART balita serta ibu hamil 9 bulan.

#### 2.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data setiap rumah tangga terpilih dilakukan dengan wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan yang

---

<sup>2</sup> *Proportional Probability to Size (PPS)* adalah salah satu desain pengambilan sampel di mana probabilitas setiap unit sampel ditentukan oleh besarnya *size* unit sampel tersebut. Dalam hal ini, unit sampelnya blok sensus dengan *size* banyaknya rumah tangga tiap blok sensus. Semakin banyak rumah tangga dalam suatu blok sensus maka probabilitas terpilihnya blok sensus tersebut sebagai sampel semakin besar.

<sup>3</sup> *Linear Systematic Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan angka kelipatan tertentu setelah unit sampel diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, unit sampelnya adalah rumah tangga (dalam satu blok sensus) yang diurutkan berdasarkan pendidikan terakhir kepala rumah tangga, keberadaan ART balita serta ibu hamil 9 bulan. Dimaksudkan supaya sampel yang terpilih meliputi semua kelompok kriteria tersebut.

ditujukan untuk individu diusahakan individu bersangkutan yang menjadi responden.

## 2.5. Pengolahan Data

Pengolahan dilakukan mulai dari pengolahan manual (pra komputer) yang meliputi pengecekan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan (pemeriksaan), pengelompokan (*batching*), pemberian kode (*coding*) serta penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar. Selanjutnya tahap perekaman data (*data entry*), kompilasi data, pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner (*validation*) sampai dengan tabulasi dilakukan dengan menggunakan komputer.

## BAB III

### KONSEP DAN DEFINISI

Untuk menghindari salah pengertian dalam membaca dan memahami data, maka perlu dibuat batasan kerangka berpikir sehingga diperoleh kesamaan persepsi tentang angka yang disajikan. Beberapa konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini, yaitu:

Sekolah adalah sekolah formal maupun non formal mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan prasekolah (*play group* dan taman kanak-kanak), kursus-kursus (mengetik, komputer, bahasa dan sejenisnya), kursus kedinasan (Diklatpim IV, III, II, Lemhanas) dan kejar paket A, B, atau C sebagai sekolah nonformal.

Seseorang dikatakan sedang/masih bersekolah apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal. Aktif mengikuti pendidikan maksudnya bahwa ia secara fisik mengikuti pelajaran di kelas, termasuk yang tidak mengikuti pelajaran di kelas tetapi diperbolehkan mengikuti ujian. Jenjang pendidikan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Jenjang pendidikan dasar, meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI) atau yang sederajat,

serta Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat.

2. Jenjang pendidikan menengah, meliputi Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau yang sederajat.
3. Jenjang pendidikan tinggi, meliputi semua pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan menengah, terbagi menjadi dua yaitu program gelar dan non gelar.

Program Gelar (Strata atau disebut juga Jalur Akademik), yaitu program yang menekankan pada pembentukan keahlian akademik mengenai penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi mencakup pendidikan sarjana muda (S0), sarjana/strata-1 (S1), strata-2 (S2), dan strata-3 (S3)

Program Non Gelar (Non Strata atau disebut juga Jalur Profesional), yaitu program yang menekankan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni. Program ini pada umumnya adalah program pendidikan diploma yang meliputi Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII) atau setara dengan sarjana muda dan Diploma IV (DIV) atau setara dengan sarjana.

Status pendidikan adalah keadaan seseorang atau penduduk pada saat pencacahan, dibedakan menjadi:

1. Tidak/belum pernah bersekolah adalah penduduk yang tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan.
2. Masih bersekolah adalah penduduk yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal. Tidak termasuk penduduk yang mengikuti pendidikan di madrasah diniyah dan kursus-kursus.
3. Tidak bersekolah lagi adalah penduduk yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, tetapi pada saat pencacahan yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dan atau tidak aktif (lagi) mengikuti pendidikan.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan seseorang yang ditandai dengan lulus ujian akhir serta mendapatkan surat tanda tamat belajar atau ijazah.

Penduduk dikatakan mampu baca tulis jika dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Orang buta yang dapat membaca huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis. Orang yang dapat



membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat baca tulis.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

## BAB IV

### PEMBAHASAN

Dalam menyusun indikator pendidikan, indikator-indikator diklasifikasikan menurut bentuk pendidikan, yaitu: (1) pendidikan umum, (2) pendidikan masyarakat, dan (3) pendidikan kedinasan. Oleh karena sebagian besar sumber data publikasi ini berasal dari Susenas, maka dalam ulasannya hanya mencoba menguraikan tentang pendidikan umum saja.

Berhubung makna pendidikan umum kurang lebih sama dengan pendidikan formal, maka indikator yang diidentifikasi berlaku untuk:

1. Jenjang pendidikan dasar yang meliputi pendidikan Prasekolah, pendidikan Sekolah Dasar (termasuk Madrasah Ibtidaiyah, SDLB dan SD Terpadu).
2. Pendidikan menengah yang meliputi pendidikan menengah pertama umum/Madrasah Tsanawiyah maupun kejuruan dan pendidikan menengah lanjutan umum/Madrasah Aliyah maupun kejuruan.
3. Pendidikan tinggi yang meliputi Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, maupun Akademi.

Gambaran tentang pendidikan di Kabupaten Pinrang dapat diukur dengan beberapa indikator pendidikan. Ada empat indikator utama yang sering digunakan. Pertama, Angka

Partisipasi Sekolah bagi penduduk usia sekolah 7-18 tahun (SD hingga SMA), sebagaimana harapan pemerintah bahwa penduduk usia tersebut adalah penduduk yang dijadikan sasaran utama pembangunan bidang pendidikan. Kedua, Angka Buta Huruf (ketidakmampuan baca tulis penduduk) penduduk usia 15 tahun atau lebih, diharapkan pada kelompok usia tersebut penduduk sudah dapat membaca dan menulis. Ketiga, Angka Anak Putus Sekolah dengan mencoba melihat gambaran anak yang berada pada kelompok usia pendidikan 7-18 tahun tetapi kondisi mereka dalam keadaan tidak aktif bersekolah. Keempat, Angka Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan berupa persentase penduduk yang minimal tamat SMA, diharapkan dengan lulus SMA penduduk sudah memiliki kualitas yang cukup memadai untuk bersaing di pasar kerja. Empat indikator utama bidang pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2020 diuraikan seperti berikut ini.

#### **4.1. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok usia tertentu terhadap penduduk dengan kelompok usia yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

Usia penduduk dalam penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama usia 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua usia 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga usia 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA. Kajian tentang Angka Partisipasi Prasekolah/Sekolah digambarkan dalam ulasan berikut.

#### **4.1.1. Partisipasi Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Kegiatan prasekolah meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Bila syarat-syaraf motorik ini telah dirangsang dengan berbagai jenis permainan maka dia akan tumbuh dan berkembang

menjadi jutaan sel motorik yang akan menjadi cikal bakal dari kecerdasan anak di masa yang akan datang. Ketika anak memasuki pendidikan usia dini, yang harus dilatih adalah bagaimana cara bermain yang benar, bernyanyi dan berkreasi sesuai dengan kekuatan fisik anak. Jadi, ketika anak memasuki dunia pendidikan usia dini (setingkat taman kanak-kanak, *play group*, kelompok bermain, tempat penitipan anak/TPA) maka anak bukanlah harus belajar membaca, menulis apalagi berhitung (Hilary Clinton -1998).

Angka partisipasi pra sekolah untuk usia (0-6 tahun) di Kabupaten Pinrang mencapai 20,17 persen pada tahun 2020. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa dari 100 penduduk usia 0-6 tahun, terdapat lebih dari 20 orang sudah mengikuti pendidikan pra sekolah. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,79 persen poin jika dibandingkan dengan partisipasi pra sekolah pada tahun 2019 (18,28 persen). Hal ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang cukup serius dalam menangani pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Pinrang.

Tabel 1. Persentase Penduduk Usia 0-6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Kelamin, 2019-2020

Partisipasi Sekolah					
Laki-Laki		Perempuan		Total	
2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17,56	21,98	19,23	18,43	18,38	20,17

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019 dan Susenas Maret 2020

#### 4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok usia tertentu, maka dilakukan penghitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok usia tertentu terhadap penduduk dengan kelompok usia yang sesuai. Penghitungan APS dikelompokkan untuk kelompok usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Secara matematis APS dapat dihitung dengan formula berikut:

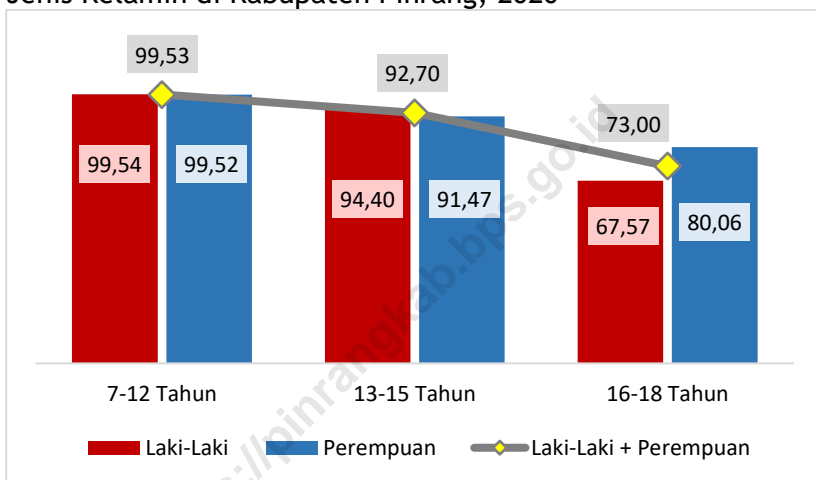
$$APS_{7-12 \text{ tahun}} = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk usia 7 – 12 tahun yang **Masih Sekolah**}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{13-15 \text{ tahun}} = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk usia 13 – 15 tahun yang **Masih Sekolah**}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{16-18 \text{ tahun}} = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk usia 16 – 18 tahun yang **Masih Sekolah**}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 tahun}} \right) \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus di atas, maka didapatkan hasil untuk APS Kabupaten Pinrang tahun 2020 seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Pada Gambar 1 terlihat bahwa APS 7-12 tahun sebesar 99,53 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7-12 tahun di Pinrang sedang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar. Sementara pada kelompok umur 13-15 tahun mencapai 92,70 persen. Lain halnya pada jenjang pendidikan SMA, APS 16-18 tahun hanya mencapai 73,00 persen saja. Rendahnya APS pada kelompok umur ini menandakan perlu adanya peningkatan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian

pendidikan, terutama jenjang SMA pada tahun-tahun yang akan datang.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan antara APS laki-laki dan perempuan, namun pada kelompok umur 16-18 tahun penduduk perempuan memiliki APS yang lebih tinggi yaitu 80,06 persen daripada penduduk laki-laki yaitu 67,57 persen. Dilihat dari sisi gender, pandangan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan sudah semakin terkikis, kesetaraan gender dalam hal pendidikan sudah tercapai.

#### **4.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, dan SMA**

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu, berapapun usianya, terhadap jumlah penduduk kelompok usia tertentu. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Selain itu, APK juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Jika nilai APK menunjukkan angka mendekati atau lebih dari 100 persen berarti ada penduduk yang sekolah belum mencukupi usia atau melebihi usia yang seharusnya. Hal ini



menggambarkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tidak berbeda dengan APS dan APM, analisis APK juga perlu dilakukan pada 3 (tiga) jenjang/tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. APK pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$APK\ SD = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk yang **Masih Sekolah SD**}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APK\ SMP = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk yang **Masih Sekolah SMP**}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 tahun}} \right) \times 100\%$$

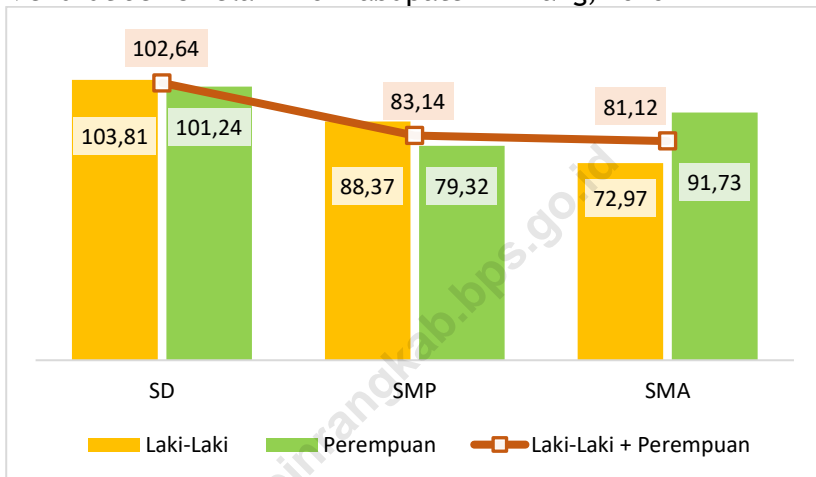
$$APK\ SMA = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk yang **Masih Sekolah SMA**}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 tahun}} \right) \times 100\%$$

Dengan menggunakan formula di atas, maka didapatkan hasil untuk APK Kabupaten Pinrang terlihat bahwa pada Gambar 2. APK SD di Kabupaten Pinrang Tahun 2020 sebesar 102,64 persen, yang berarti selain penduduk berusia 7 hingga 12 tahun yang duduk di bangku SD, terdapat penduduk yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun yang duduk di tingkat pendidikan yang sama. Sementara itu, APK SMP sebesar 83,14 persen, dan APK SMA sebesar 81,12 persen.

Tingginya angka APK pada jenjang pendidikan SD menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang berminat

untuk menuntaskan pendidikan dasar 6 tahunnya mengingat APK tidak memperhatikan usia dalam penghitungannya.

Gambar 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP dan SMA Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

#### 4.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA

Selain APS dan APK di atas, masih ada lagi penghitungan Angka Partisipasi sekolah yang lain, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan terjemahan dari *Net Enrolment Ratio* (NER). APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Seperti halnya APS, APM juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis/jenjang

pendidikan, yaitu pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk pengkajiannya di masing-masing jenjang pendidikan, digunakan formula sebagai berikut :

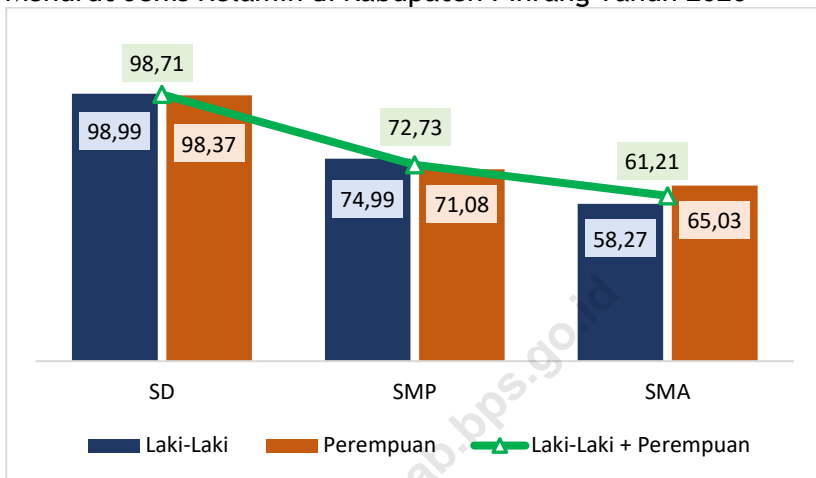
$$APM\ SD = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk yang **Masih Sekolah SD** usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM\ SMP = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk yang **Masih Sekolah SMP** usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM\ SMA = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk yang **Masih Sekolah SMA** usia 16 – 18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 tahun}} \right) \times 100\%$$

Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Gambar 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

APM SD digunakan untuk mengetahui partisipasi sekolah anak SD ditinjau dari ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun 2020, APM SD di Kabupaten Pinrang mencapai 98,71 persen. Tinggi rendahnya nilai APM ini lebih disebabkan oleh kesesuaian penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP tahun 2020 di Kabupaten Pinrang sebesar 72,73 persen. Jika dilihat dari sisi gender, APM SMP tidak menunjukkan adanya perbedaan yang jauh antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, perhatian dan wawasan masyarakat tentang pendidikan sudah mulai terbuka. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan

tidak menjadi penghalang dalam menuntut pendidikan di tingkat SMP. Artinya, kesempatan bersekolah pada jenjang SMP terbuka lebar bagi siapapun.

Pada tahun 2020 APM SMA di Kabupaten Pinrang mencapai 61,21 persen. APM SMA paling rendah jika dibandingkan dengan APM SD dan APM SMP, namun demikian APM SMA ini dapat menggambarkan pencapaian program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2020.

#### 4.2. Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca yang dimaksud disini tidak dituntut harus bisa mengerti apa yang dibaca/ditulisnya.

Manfaat angka ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Negara Indonesia sendiri telah ikut serta menandatangani MDGs (*Milenium Development Goals*) yang di luncurkan oleh *United Nation* (PBB). Salah satu tujuannya adalah pada tahun 2015 diharapkan buta aksara di kalangan

marginal dapat dikurangi minimal menjadi 50 persen. Sebagai bagian dari dunia global, Kabupaten Pinrang khususnya pun wajib mencapai target tersebut. Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis, baik huruf latin dan atau huruf lainnya. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah.

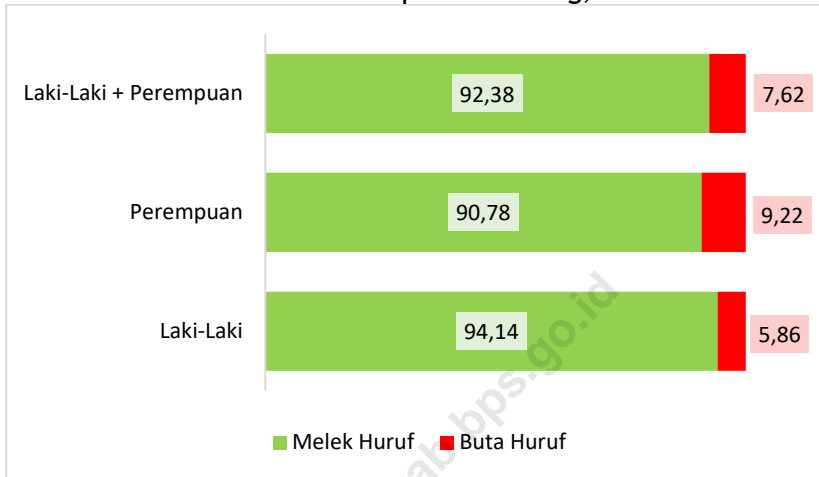
Tahun 2020, tercatat penduduk Kabupaten Pinrang yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis baik itu huruf latin maupun huruf lainnya mencapai 92,38 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,09 persen poin jika dibandingkan dengan AMH tahun

2019 yaitu 93,88 persen. Dengan kata lain, kedepannya, kewajiban Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk menuntaskan buta aksara adalah sebanyak 7,62 persen dari keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas. Beban ini sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 6,12 persen.

Usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program paket A, paket B, dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik.

Buta huruf pada penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki. Angka buta huruf perempuan tahun 2020 sebesar 9,22 persen sedangkan angka buta huruf laki-laki sebesar 5,86 persen. Upaya pemberantasan buta huruf melalui kursus/pelatihan keaksaraan fungsional atau program kejar paket A dan paket B yang mengarah pada tujuan penuntasan buta aksara harus lebih ditingkatkan, sehingga upaya mewujudkan komitmen MDG's dapat terwujud tuntas di tahun tahun berikutnya.

Gambar 4. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Guna memperjelas kajian di atas, perlu dilakukan kajian yang spesifik mengarah pada angka buta huruf menurut kelompok usia untuk membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah. Tabel 3 menyajikan angka buta aksara menurut kelompok remaja (15-24 tahun), kelompok dewasa (25-59 tahun) dan kelompok lansia (60 tahun ke atas), di Kabupaten Pinrang tahun 2020.



Tabel 2. Angka Buta Huruf (ABH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2020

Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	15-24	25-59	60+
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	0,45	4,04	23,18
Perempuan	0,78	6,75	29,01
<b>Total</b>	<b>0,61</b>	<b>5,47</b>	<b>26,48</b>

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebaran buta aksara pada penduduk 15 tahun ke atas sebagian besar berada pada kelompok usia 60 tahun ke atas atau pada kelompok lansia. Sebesar 26,48 persen penduduk lansia tergolong sebagai buta aksara. Sedangkan untuk kelompok usia dewasa (25-59 tahun) terdapat 5,47 persen penduduk yang masih belum bisa baca tulis, dan untuk kelompok usia remaja (15-24) tahun, sebesar 0,61 persen yang buta aksara.

Dilihat dari sisi gender, pada semua kelompok usia, buta huruf untuk perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Program pengentasan buta aksara mungkin telah berhasil pada kelompok usia remaja (15-24) tahun. Terlihat dari persentase penduduk buta aksara yang sangat kecil, kurang dari satu persen.

Hal ini bisa disebabkan oleh program pengentasan yang dilakukan kemungkinan besar hanya diikuti oleh penduduk kelompok usia dewasa saja (25-59 tahun), sedangkan persentase terbesar buta huruf berada pada kelompok usia tua yaitu 60 tahun ke atas. Selain itu, mayoritas perempuan yang telah menginjak usia tua (60 tahun ke atas) yang berdomisili di pedesaan cenderung disibukkan dengan urusan rumah tangga sehingga waktunya menjadi terbatas untuk mengikuti pendidikan. Disamping itu, persepsi perempuan lansia akan pentingnya pendidikan masih rendah, sehingga hal ini menghambat keberhasilan program pengentasan buta aksara.

Jika dilihat lebih rinci, selisih buta huruf di kelompok usia remaja antara perempuan dengan laki-laki hanya 0,33 persen poin. Kecilnya angka buta huruf di usia remaja menunjukkan semakin tingginya tingkat kesadaran penduduk akan pendidikan dan semakin menipisnya bias gender di masyarakat.

#### **4.3. Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi**

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita luhur ini diimplementasikan ke dalam kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dengan melaksanakan berbagai program ke arah

tersebut. Salah satu upaya meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas adalah melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang. Selain itu dengan melakukan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang mencakup pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu termasuk Program KIP Kuliah. Selain itu, pemerintah turut melakukan pemerataan layanan pendidikan antarwilayah salah satunya dengan menerapkan model layanan yang tepat untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Selanjutnya, untuk melakukan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun, pemerintah melakukan penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan turut perlu ditingkatkan. (Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024).

Tabel 3. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2020

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	0,79	41,08	12,22	19,44	26,48
Perempuan	0,72	35,59	15,95	22,25	25,49
Kabupaten Pinrang	0,76	38,42	14,03	20,80	26,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

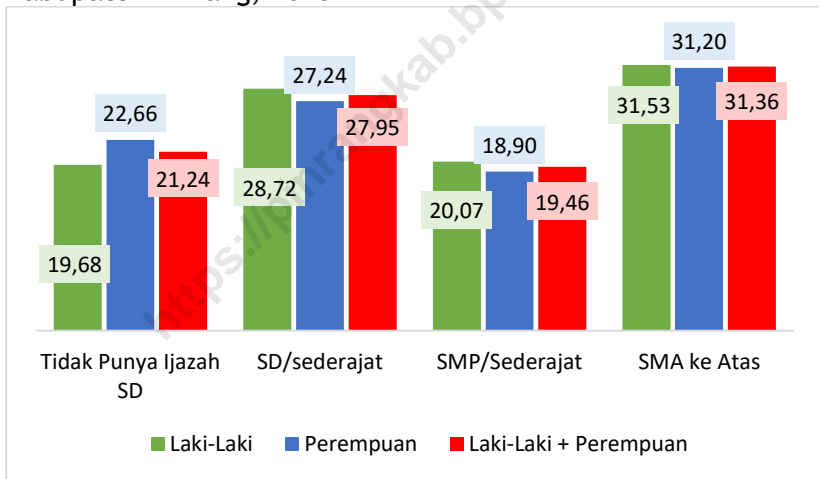
Pada tahun 2020, tercatat penduduk Kabupaten Pinrang usia 7-24 tahun yang masih menempuh pendidikan (masih bersekolah) sebesar 73,25 persen. Namun demikian, masih terdapat penduduk Pinrang usia 7-24 tahun yang tidak atau belum pernah bersekolah, yaitu sebesar 0,76 persen.

#### 4.4. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat kemampuan SDM. Tahun 2020 persentase penduduk Kabupaten Pinrang usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SD dan SMP sebesar 47,41 persen, yang mempunyai ijazah SMA

dan perguruan tinggi sebesar 31,36 persen, dan sisanya sebesar 21,24 persen penduduk Kabupaten Pinrang tidak mempunyai ijazah SD. Komposisi ini menunjukkan bahwa capaian pendidikan di Kabupaten Pinrang masih relatif rendah karena proporsi penduduk yang hanya mengenyam pendidikan hingga pendidikan dasar lebih banyak dibanding penduduk yang berpendidikan tinggi.

Gambar 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

#### 4.5. Fasilitas Pendidikan dan Jumlah Siswa

Fasilitas pendidikan baik berupa gedung maupun pendidikannya merupakan faktor yang paling utama untuk memajukan pendidikan. Pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah

sekolah negeri dan swasta pada jenjang pendidikan SD sebanyak 323 sekolah, MI sebanyak 29 sekolah, SMP sebanyak 57 sekolah, MTs sebanyak 25 sekolah, SMA sebanyak 15 sekolah, MA sebanyak 8 sekolah, SMK sebanyak 16 sekolah dan 1 SLB. Jumlah seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 adalah 474 sekolah dengan jenjang pendidikan SD sampai SMA. Sama halnya dengan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik dan jumlah murid yang terbesar berada pada tingkat pendidikan SD.

Tabel 4. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pinrang, 2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah			Jumlah Guru	Jumlah Murid
	Negeri	Swasta	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	315	8	323	3.378	40.807
MI	1	28	29	316	3.181
SMP	52	5	57	1.390	15.151
MTS	1	24	25	385	3.879
SMA	11	4	15	465	7.905
MA	1	7	8	176	1.926
SMK	10	6	16	573	8.047
SLB	1	0	1	15	49
<b>Total</b>	<b>392</b>	<b>82</b>	<b>474</b>	<b>6.698</b>	<b>80.945</b>

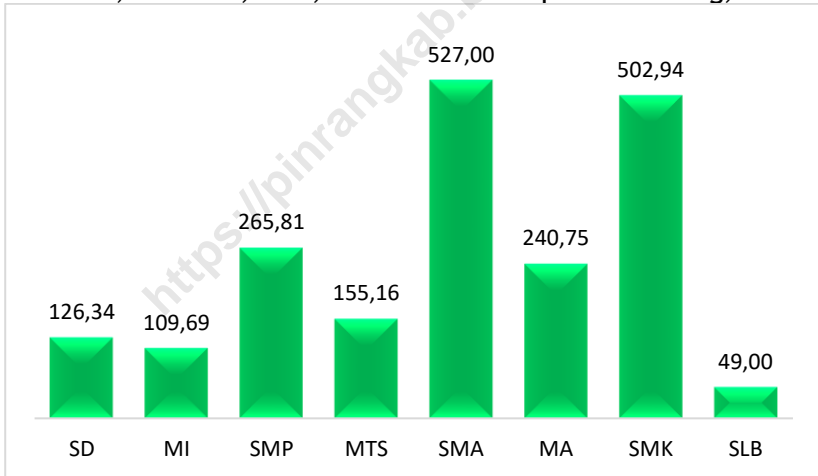
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data semester ganjil tahun ajaran 2020/2021;

Kementerian Agama, data semester ganjil tahun ajaran 2020/2021

#### 4.6. Rasio Murid/Siswa terhadap Sekolah dan Guru

Gambar 6 memperlihatkan rasio murid terhadap sekolah untuk semua jenjang di Kabupaten Pinrang tahun 2020. Indikator ini menunjukkan daya tampung rata-rata untuk setiap jenjang pendidikan. Daya tampung SD di Kabupaten Pinrang adalah 126,34 murid. Hal ini berarti bahwa rata-rata setiap SD di Kabupaten Pinrang mampu menampung 126 sampai 127 murid pada satu sekolah tersebut.

Gambar 6. Rasio Murid Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SLB di Kabupaten Pinrang, 2020

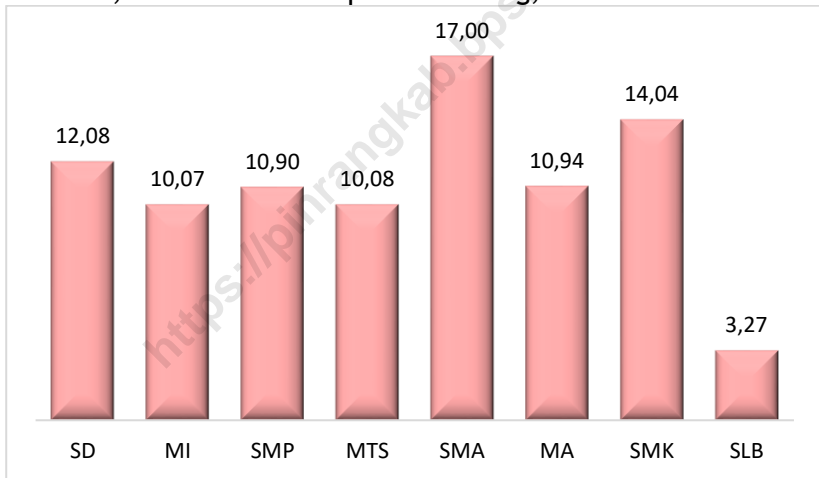


Sumber : Tabel 5, diolah

Untuk MI, rata-rata daya tampung setiap sekolah di Kabupaten Pinrang adalah 109 sampai 110 murid di satu MI. Rata-rata daya tampung setiap SMP di Kabupaten Pinrang adalah 265 sampai 266 murid di satu SMP dan rata-rata daya

tampung setiap MTs di Kabupaten Pinrang adalah 155 sampai 156 murid di satu MTs. Kemudian daya tampung rata-rata setiap SMA di Kabupaten Pinrang adalah 527 murid di tiap SMA dan untuk MA adalah 240 sampai 241 murid di tiap sekolah. Selanjutnya SMK memiliki daya tampung rata-rata 502 hingga 503 murid. Terakhir, untuk SLB di Kabupaten Pinrang daya tampungnya adalah 49 murid di satu sekolah.

Gambar 7. Rasio Murid Terhadap Guru Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang, 2020



Sumber : Tabel 5, diolah

Gambar 7 menunjukkan rasio murid terhadap guru, di mana dapat dilihat beban mengajar untuk setiap guru, rata-rata beban mengajar satu orang guru SD di Kabupaten Pinrang adalah 12 sampai 13 orang murid dan beban guru MI, SMP, MTS, dan MA rata-rata 10 sampai 11 murid. Kemudian beban guru



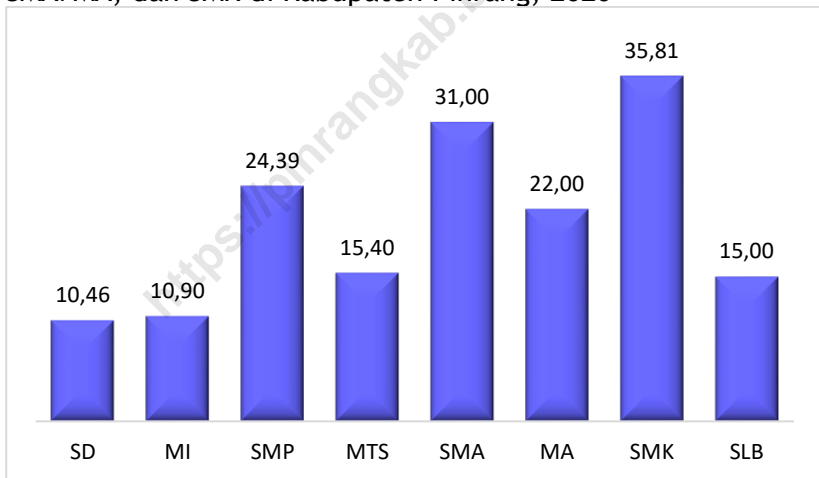
SMA rata-rata adalah 17 sampai 18 murid. Beban guru SMK yaitu 14 sampai 15 murid dan guru SLB mempunyai beban rata-rata mengajar 2 sampai 3 murid.

Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 17 menyebutkan bahwa seorang guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya bertanggung jawab atas 20 murid. Sedangkan, seorang guru pada jenjang SMK idealnya bertanggung jawab atas 15 murid. Dari gambar 7 terlihat bahwa rasio murid-guru jenjang SD sampai SMA di Kabupaten Pinrang sudah cukup ideal dengan standar yang sudah ditetapkan.

Meskipun demikian, rasio murid-guru bukanlah faktor mutlak penentu keberhasilan anak dalam proses belajar. Idealitas rasio tersebut akan bergantung kepada beberapa faktor. Rasio murid-guru di kelas akan memengaruhi manajemen kelas, proses belajar mengajar di kelas. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya indikator penentu kualitas belajar di kelas. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan. Salah satu cara meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dapat melalui peningkatan

profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. Hal tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, dapat juga dengan pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru, yakni S1/DIV dan dengan peningkatan kesejahteraan pendidik.

Gambar 8. Rasio Guru Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang, 2020



Sumber : Tabel 5, diolah

Informasi dari Gambar 8 menunjukkan rata-rata jumlah guru yang mengajar pada satu sekolah. Jenjang SD dan MI rata-rata memiliki 10 sampai 11 orang guru. Pada jenjang SMP

memiliki 24-25 guru, MTs memiliki 15 sampai 16 guru, SMA memiliki 31 guru, MA memiliki 22 orang guru, SMK memiliki 35 sampai 36 guru, dan SLB memiliki 15 guru.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

## BAB V

### PENUTUP

Dari hasil kajian data Susenas 2020 sebelumnya, dan hasil analisis dengan menggunakan beberapa indikator pendidikan yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Pinrang, antara lain:

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (5-6 tahun) baru mencapai 20,17 persen di tahun 2020, meningkat 6,52 persen poin apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 13,65 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas SDM sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu terutama di beberapa kecamatan di Kabupaten Pinrang yang belum ada fasilitas PAUD. Perlu juga ditingkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini, mengingat ada beberapa fasilitas PAUD tidak beroperasi lagi dikarenakan tidak ada siswa yang mendaftar.
2. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah, baik APS, APK maupun APM di Kabupaten Pinrang, ada kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kecil angka partisipasinya.

Semakin rendahnya angka partisipasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh rendahnya partisipasi sekolah baik dari penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.

3. Hingga tahun 2020 masih terdapat 7,62 persen penduduk Kabupaten Pinrang usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis (buta aksara).
4. Di Kabupaten Pinrang masih ada sekitar 0,76 persen dari penduduk berusia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah. Dilihat dari segi gender, tidak ada perbedaan yang signifikan antara penduduk laki-laki dan perempuan dengan status pendidikan tidak/belum pernah bersekolah.
5. Partisipasi penduduk Kabupaten Pinrang dalam menempuh pendidikan hingga tingkat menengah dan tinggi tahun 2020 masih perlu ditingkatkan karena persentase penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan yang tinggi semakin berkurang dibandingkan dengan jenjang pendidikan di bawahnya.
6. Pada tahun 2020 masih ada sekitar 21,24 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD. Persentase perempuan 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD lebih tinggi daripada laki-laki.

7. Pada tahun ajaran 2020/2021 semester ganjil, jumlah guru terbanyak ada pada jenjang SD/MI, sebanding dengan banyaknya sekolah pada jenjang SD/MI.
8. Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Pinrang pada tahun ajaran 2020/2021 semester ganjil sudah cukup ideal sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Semakin tinggi nilai rasio, beban kerja guru dalam mengajar juga semakin besar, oleh karena itu akan semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2021. *Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2021. *Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2020*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan: Makassar.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2019. *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Versi 14 Agustus 2019)*. Kementerian PPN/Bappenas: Jakarta.

## LAMPIRAN

Tabel 1. RSE Angka Partispasi Sekolah (APS) dan Angka Partispasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2020

Karakteristik	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>APS</b>			
7-12 tahun	0,338	0,446	0,271
13-15 tahun	2,781	4,061	2,830
16-18 tahun	9,409	7,704	6,498
<b>APM</b>			
SD	0,525	0,890	0,491
SMP	6,782	7,541	5,659
SMA	11,222	12,241	8,424



Tabel 2. RSE Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2020

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Jenis Kelamin</b>					
Laki-Laki	55,884	6,887	15,871	12,173	9,475
Perempuan	62,947	7,009	15,132	11,515	10,622
<b>Kabupaten Pinrang</b>					
	<b>41,183</b>	<b>4,874</b>	<b>9,224</b>	<b>8,459</b>	<b>7,677</b>

Tabel 3. RSE Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2020

Karakteristik	Tidak	SD/	SMP/	SMA/ ke
	Punya Ijazah SD	sederajat	sederajat	atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Jenis Kelamin</b>				
Laki-Laki	14,094	7,323	8,215	7,498
Perempuan	8,984	7,147	7,381	7,905
<b>Kabupaten Pinrang</b>	<b>9,415</b>	<b>5,858</b>	<b>5,977</b>	<b>6,435</b>



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://pinangkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No.18, Pinrang, Sulawesi Selatan

Telp/Fax : (0421) 921 021

Email : [bps7315@bps.go.id](mailto:bps7315@bps.go.id)

Homepage : [pinangkab.bps.go.id](http://pinangkab.bps.go.id)